



# Urgensi kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan akuntansi lingkungan

NUR KHALISA M. MUSA<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan, 92113, Indonesia;

\*Korespondensi: [nurkhalisammusa@gmail.com](mailto:nurkhalisammusa@gmail.com)

Diterima: 20 Juli, 2024

Disetujui: 27 Agustus, 2024

## ABSTRAK

**Latar Belakang:** Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, menganalisis kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, dan mengeksplorasi urgensi kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. **Metode:** Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data penelitian ini adalah data primer yang didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder yang didapatkan dari profil perusahaan, dokumen AMDAL perusahaan, dokumen RKL-RPL perusahaan, dokumen izin lingkungan perusahaan dan artikel terkait. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui tiga tahap, yaitu: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. **Temuan:** Hasil penelitian ini menemukan bahwa PT HNAI dalam penerapan akuntansi lingkungannya belum mempunyai laporan biaya lingkungan khusus. Biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan hanya dicatat dalam akun biaya lingkungan pada laporan keuangan perusahaan. Adapun laporan keuangan PT HNAI tidak dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, efek dari biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT HNAI, belum mampu meminimalisir secara signifikan dampak lingkungan yang dirasakan warga. **Kesimpulan:** Kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT HNAI belum sepenuhnya memenuhi syarat kolaborasi. Sebab idealnya dari 8 komponen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukur keberhasilan suatu kolaborasi, kolaborasi stakeholder PT HNAI hanya dapat memenuhi 3 komponen kolaborasi. PT HNAI dan stakeholder eksternalnya memiliki kepentingan yang berbeda. Namun meskipun demikian, baik PT HNAI pun stakeholder eksternalnya, memiliki kebutuhan yang sama terhadap keberlangsungan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kolaborasi antar stakeholder dalam proses pencapaian tujuan bersama dalam hal pemeliharaan kelestarian lingkungan sebagai sumber kehidupan semua makhluk.

**KATA KUNCI:** akuntansi lingkungan; kolaborasi; stakeholder; urgensi.

## ABSTRACT

**Background:** This study aims to reveal the implementation of environmental accounting at PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, analyze stakeholder collaboration in the implementation of environmental accounting at PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, and explore the urgency of stakeholder collaboration in the implementation of environmental accounting at PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. **Methods:** This type of research is classified as qualitative research with a case study approach. The data source for this study is primary data obtained through observation and interviews with internal and external stakeholders of PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. In addition, this study also uses secondary data obtained from the company profile, the company's AMDAL document, the company's RKL-RPL document, the company's environmental permit document and related articles. The data analysis technique in this study was carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and drawing conclusions. **Findings:** The results of this study found that PT HNAI in implementing its environmental

### Cara Pengutipan:

Musa, N. K. M. (2024). Urgensi kolaborasi stakeholder dalam mewujudkan akuntansi lingkungan. *Environmental, Social, Governance, and Sustainable Business*, 1(2), 88-110. <https://doi.org/10.61511/esgsb.v1i2.2024.1076>

**Copyright:** © 2024 dari Penulis. Dikirim untuk kemungkinan publikasi akses terbuka berdasarkan syarat dan ketentuan dari the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).



accounting does not yet have a special environmental cost report. The environmental costs incurred are only recorded in the environmental cost account in the company's financial statements. The financial statements of PT HNAI cannot be accessed by researchers. In addition, the effects of environmental costs incurred by PT HNAI have not been able to significantly minimize the environmental impacts felt by residents. **Conclusion:** Stakeholder collaboration in the implementation of environmental accounting at PT HNAI has not fully met the requirements for collaboration. Because ideally, of the 8 components used in this study as a measure of the success of a collaboration, PT HNAI stakeholder collaboration can only meet 3 components of collaboration. PT HNAI and its external stakeholders have different interests. However, even so, both PT HNAI and its external stakeholders have the same needs for the sustainability of their environment. Therefore, it is very important to collaborate between stakeholders in the process of achieving common goals in terms of maintaining environmental sustainability as a source of livelihood for all creatures.

**KEYWORDS:** collaboration; environmental accounting; stakeholders; urgency.

---

## 1. Pendahuluan

Lingkungan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan. Sebab, keberadaan lingkungan memengaruhi pertumbuhan manusia, hewan dan tumbuhan (Sukananda dan Nugraha, 2020). Lingkungan sering disebut sebagai lingkungan hidup, tempat terjadinya interaksi antar makhluk hidup, semua benda, daya serta keadaan dengan kesatuan ruang (Indrawati dan Rini, 2018). Demikian fungsi lingkungan bagi keberlangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya (Darwin, 2020).

Dalam beberapa dekade belakangan ini lingkungan global mengalami banyak permasalahan dan memunculkan kekhawatiran (Koroy, 2017). Hal ini sudah sejak lama menjadi pusat perhatian, diawali tahun 1992 di Rio de Janeiro pada KTT Bumi PBB (Farida, 2019). Menurut data dari PBB (2017) pada abad 21 ini suhu permukaan bumi mengalami peningkatan, diprediksi lebih dari 3 derajat celcius. Jika secara terus-menerus dibiarkan akan berdampak pada perubahan iklim yang tidak lagi dapat dikendalikan (Bahri, 2018).

Di Indonesia, isu lingkungan terbilang krusial. Hal ini dapat diukur dengan melihat fenomena, mulai dari perubahan iklim drastis, deforestasi, pencemaran udara, pencemaran laut, krisis air, krisis energi, kerusakan keanekaragaman hayati dan tata guna lahan, pencemaran bahan beracun dan logam berat, serta pengelolaan sampah yang tidak ditangani dengan baik (Farida, 2019). Konon, aktivitas manusia diakui sebagai penyebab utama perubahan lingkungan tersebut (Nursamsiah et al., 2019). Aktivitas yang dimaksud ini adalah aktivitas ekonomi yang dijalankan perusahaan industri (Maharani & Handayani, 2021).

Aktivitas industri memang pada dasarnya memiliki potensi besar terhadap kerusakan lingkungan (Anindita & Hamidah, 2020). Selain dari bahan produksinya yang ditopang sumber daya alam yang proses pengambilannya cenderung eksploitatif, limbah yang dihasilkan juga berbuntut merusak lingkungan (Ningsih & Rachmawati, 2017). Limbah yang merusak lingkungan disebabkan oleh industri-industri yang belum mengolah limbah dengan benar dan tidak memberikan perhatian terhadapnya (Qodriana & Nurdiwati, 2017). Saat ini masih banyak perusahaan yang dalam operasionalnya menggunakan bahan bakar fosil sebagai sumber energinya (Bahri, 2018). Akibatnya terjadi pelepasan karbon ke atmosfer (emisi karbon) yang menyebabkan pemanasan global. Dampak lanjutannya adalah perubahan iklim dan perubahan iklim memengaruhi perubahan pola cuaca, naiknya permukaan air laut dan cuaca ekstrem lainnya. Banyak operasi bisnis yang melibatkan alam mengakibatkan polusi udara, sebab pembakaran hutan yang disengaja (guna lebih cepat membuka lahan). Menurut Wibowo & Mulia (2020) kerusakan alam tidak hanya terjadi karena pembakaran hutan dan lahan saja, namun usaha pertambangan juga turut mendukung kerusakan lingkungan.

Industri tambang kerap dinilai menyebabkan kerusakan sosial dan lingkungan yang besar dibanding dengan perusahaan lainnya (Farida, 2019). Masalah-masalah lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas penambangan antara lain: penurunan produktivitas tanah, erosi dan sedimentasi tanah, perubahan iklim mikro, serta terganggunya flora dan fauna

(Rizki & Firmansyah, 2021). Kenyataan ini melahirkan perspektif baru bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya pertumbuhan ekonomi dan tercapainya pemerataan, tetapi juga kelestarian lingkungan di mana pembangunan itu berlangsung.

Saat ini stakeholders menuntut perusahaan harus bertanggung jawab atas masalah sosial dan lingkungan yang disebabkan, bukan sebaliknya dibebankan pada masyarakat (Bahri, 2018). Perusahaan dituntut untuk mengerti bahwa tanggung jawabnya bukan hanya kepada pemegang saham saja, melainkan harus secara menyeluruh mencakup lingkungan masyarakat sekitar, sehingga secara tidak langsung perusahaan dapat memperoleh manfaat dari iktikad baik yang dilakukan (H et al., 2019; Koroy, 2017; Muliwati & Hariyati, 2021).

Akuntansi lingkungan (*environmental accounting*) adalah bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap dampak kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas perusahaan (Nursamsiah et al., 2019). Aktivitas yang timbul dari pengelolaan lingkungan memunculkan biaya-biaya lingkungan (Indrawati & Rini, 2018). Perusahaan perlu mengukur biaya tersebut. Akuntansi sebagai *calculate science* menerapkan perhitungan biaya lingkungan dalam implementasi ilmunya dengan tujuan transparansi perusahaan dalam mengungkapkan informasi lingkungan (Hati, 2018). Pengungkapan aktivitas lingkungan dan biaya lingkungan dapat memberikan gambaran pada pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan untuk program perusahaan terkait dengan pelestarian lingkungan di masa depan (Ningsih & Rachmawati, 2017). Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab lingkungannya.

Dalam pengimplementasian akuntansi lingkungan dibutuhkan kolaborasi antar stakeholders (perusahaan, pemerintah dan masyarakat) (Darwin, 2020). Kolaborasi itu hanya dapat terwujud jika para pemangku kepentingan memiliki perspektif yang sama terhadap lingkungan, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan serta rasa bertanggung jawab yang sama terhadap masalah lingkungan. Hal ini dikarenakan cara pandang yang sama akan membentuk kesadaran yang sama pula. Dari kesadaran yang sama, relasi antar stakeholders akan menjadi lebih baik. Melalui hubungan baik para stakeholders (*internal dan eksternal*), dapat memengaruhi tujuan, strategi serta kualitas penerapan akuntansi lingkungan.

Akuntansi lingkungan dapat mendorong pertanggungjawaban sosial dan lingkungan perusahaan, membantu entitas untuk merespon isu lingkungan hidup, mewujudkan citra perusahaan yang lebih positif di mata masyarakat, mendorong konsumen untuk membeli produk yang ramah lingkungan, serta meneguhkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup (Darwin, 2020). Untuk menunjang penerapan akuntansi lingkungan pada perusahaan, kolaborasi stakeholder perusahaan (*internal dan eksternal*) sangat dibutuhkan.

Untuk itu, melihat realita kerusakan lingkungan yang banyak disebabkan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif seperti perusahaan tambang dan pabrik bijih galian tambang, penelitian ini mencoba mengulik kolaborasi stakeholders dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia.

PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (HNAI) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang industri pengolahan dan pemurnian mineral nikel dan jetty beserta utilitasnya dalam bentuk kegiatan industri yang mengolah bahan baku bijih nikel menjadi produk nikel yang berbasis di Bantaeng, Sulawesi Selatan. HNAI merupakan perusahaan pengolah mineral nikel di Shanghai, Tiongkok yang bekerja sama dengan PT Duta Nikel Sulawesi pada tahun 2012, yang didasari UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia? Bagaimana kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia? Bagaimana urgensi kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia?

## 2. Metode

### 2.1 Jenis dan Objek Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari masalah sosial atau kemanusiaan. Proses penelitian ini melibatkan upaya-upaya penting, seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif serta menafsirkan makna data. Dalam penalaran induktif, pencarian pengetahuan dilakukan dengan observasi terhadap hal-hal yang khusus yakni fakta-fakta konkret. Kemudian laporan akhir dari penelitian ini memiliki kerangka yang fleksibel (Kusumastuti & Khoiron, 2019: 2-3).

Objek penelitian ini adalah PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, yang terletak di wilayah pesisir Bantaeng, Sulawesi Selatan. Persisnya berada di desa Papan Loe, kecamatan Pa'jukukang. PT Huadi Nickel-Alloy adalah perusahaan pengolahan dan pemurnian mineral nikel di Shanghai, Tiongkok, yang bekerja sama dengan PT Duta Nikel Sulawesi dari Indonesia.

### 2.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran tentang beberapa aspek khusus yang perlu dikaji lebih mendalam dan intensif (Kusumawardani et al., 2018). Penelitian studi kasus adalah penelitian yang terikat pada konteksnya sebab mendasarkan kajiannya pada sifat kekhususan. Maksudnya adalah semua rancangan studi kasus dalam penelitian kualitatif selalu bersifat kontekstual. Pendeskripsian studi kasus dibuat secara rinci dan mendalam sesuai potret kondisi dalam suatu konteks.

### 2.3 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui proses observasi, wawancara, survei, eksperimen dan sebagainya. Data sekunder adalah data yang telah ada sebelumnya, dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, data perusahaan, dokumen pemerintah dan lain sebagainya.

### 2.4 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Dalam penelitian ini, menggunakan beberapa metode, yaitu sebagai berikut:

#### 2.4.1 Observasi

Observasi merupakan penyelidikan secara mendalam. Dikatakan sebagai penyelidikan secara mendalam karena mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain. Metode observasi tidak terbatas pada manusia saja tetapi juga objek alam yang lain. Jadi peneliti berangkat langsung ke lokasi penelitian dan mengamati serta meninjau secara cermat kondisi yang ada di sana. Inilah sebabnya, observasi merupakan satu proses yang kompleks karena ia tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting dalam proses ini adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini dilakukan apabila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, serta gejala-gejala alam.

### 2.4.2 Wawancara

Menurut Bodgan dan Biklen (1982) wawancara adalah proses percakapan yang terjadi biasanya antara dua orang (kadang lebih) yang diarahkan oleh salah seorang dengan tujuan penggalan informasi tertentu. Wawancara dapat dilakukan dengan cara terstruktur, semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini ialah wawancara semiterstruktur. Menurut Cooper dan Schindler (2014) wawancara semiterstruktur ialah wawancara yang diawali dengan beberapa pertanyaan terstruktur kemudian dilanjutkan dengan pertanyaan spesifik sesuai dengan karakteristik terwawancara. Wawancara dapat dilakukan dengan tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan tatap muka. Jika setelah melakukan wawancara tatap muka, namun data yang dihasilkan masih kurang, peneliti akan melanjutkan wawancara via telepon apabila kondisi tidak memungkinkan untuk kembali ke lokasi penelitian. Dalam melakukan wawancara, peneliti menggunakan alat bantu recorder dan buku catatan untuk menyimpan suara dan mencatat hal-hal yang dianggap penting. Setelah melakukan wawancara, peneliti membuat transkrip wawancara agar hasil wawancara dapat dianalisis.

Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan yang memungkinkan memberikan jawaban yang relevan dengan rumusan masalah. Penelitian ini mendayagunakan 12 orang informan, yakni: Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, Kepala Desa Papan Loe, Sekretaris Desa Papan Loe, dan 8 perwakilan dari masyarakat desa Papan Loe. Para informan tersebut dipandang layak untuk memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

### 2.4.3 Dokumentasi

Pengumpulan data dalam penelitian ini juga dilakukan dengan dokumentasi, yakni mengumpulkan dokumen-dokumen seperti dokumen laporan pertanggung jawaban sosial perusahaan, foto dan dokumen lain yang terkait dengan penelitian. Peran metode dokumentasi dalam pengumpulan data penelitian kualitatif sangat besar, sebab beberapa catatan tertulis dan gambar diperlukan untuk membantu proses analisis data pada penelitian (Subandi, 2011). Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan catatan-catatan akuntansi serta dokumen lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti pedoman kebijakan perusahaan untuk pengolahan limbah dan catatan-catatan terkait biaya lingkungannya.

### 2.4.4 Studi Pustaka

Studi pustaka yaitu pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari buku, artikel jurnal, majalah, dan karya tulis ilmiah lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.

## 2.5 Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat untuk memperoleh data. Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti sendiri. Dengan bekal ingatan, catatan, rekaman, kamera atau video, seorang peneliti kualitatif akan berupaya mendapatkan informasi sebanyak mungkin mengenai hal yang sedang dicari tahunya (Sarwono, 2006: 212).

## 2.6 Teknik Analisis Data

Analisis data ialah proses mencari dan mengorganisasikan atau mengatur secara sistematis catatan lapangan, transkrip wawancara serta bahan-bahan lain yang telah

dikumpulkan demi menambah pemahaman sendiri, sehingga memungkinkan temuan tersebut dilaporkan ke publik. Dengan analisis data, data dapat tersusun dengan baik dan teratur sehingga memudahkan makna temuan diketahui (Salim & Syahrums, 2012: 145-146). Menurut Miles dan Huberman proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan melalui tiga tahap, yakni: (a) reduksi data; (b) penyajian data dan; (c) penarikan kesimpulan. Tahap-tahap tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

### *2.6.1 Reduksi Data (Penelusuran Awal)*

Reduksi data merupakan kegiatan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara terus-menerus selama penelitian berlangsung.

### *2.6.2 Penyajian Data (Penelusuran Lanjutan)*

Penyajian data merupakan bagian dari proses analisis. Penyajian data dirancang untuk menggabungkan informasi tersusun dalam suatu bentuk padu yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dari peneliti dan pengambilan tindakan.

### *2.6.3 Penarikan Kesimpulan (Penelusuran Akhir)*

Setelah data disajikan, maka tibalah proses penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini seorang peneliti kualitatif mulai mencari arti benda-benda dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat serta proposisi. Proses verifikasi dalam hal ini adalah dengan melakukan peninjauan ulang terhadap catatan lapangan dan tukar pikiran untuk mengembangkan “kesepakatan inter-subjektivitas”.

## *2.7 Uji Keabsahan Data*

Dalam penelitian kualitatif, pengujian keabsahan data merupakan hal yang sangat diperhatikan guna mendapatkan hasil yang valid. Sebab suatu hasil penelitian tidak berarti apa-apa jika tidak memiliki kredibilitas. Upaya pemeriksaan keabsahan data ini juga merupakan salah satu cara untuk meminimalisasi perasaan kurang yakin tentang kebenaran dalam suatu data penelitian kualitatif. Untuk memperoleh validitas data, peneliti akan mencoba menggunakan triangulasi. Sebagaimana triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang dapat memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan (Salim & Syahrums, 2012: 165-166). Triangulasi yang umum dilakukan ialah pengecekan terhadap sumber lainnya. Dalam hal ini pemeriksaan silang terhadap data yang diperoleh dapat dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data hasil observasi dan pengkajian dokumen terkait dengan fokus dan subjek penelitian. Triangulasi dapat pula dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai informan (sumber data) yang terkait dengan data wawancara tentang pandangan, dasar bersikap dan nilai-nilai yang muncul dari perilaku subjek penelitian. Penelitian ini akan menggunakan triangulasi teori. Triangulasi teori yaitu memperdalam uji data dengan menggunakan dua teori atau lebih untuk dipadukan atau dibandingkan sampai menghasilkan sebuah kesimpulan informasi yang andal. Kesimpulan tersebut kemudian dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias pribadi peneliti atas kesimpulan yang dihasilkan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1 Penerapan Akuntansi Lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia

Pada dasarnya, semua perusahaan yang bergerak dalam bidang pengelolaan sumber daya alam punya kewajiban untuk menjalankan tanggung jawab dalam bidang sosial dan lingkungan. Oleh karenanya, akuntansi lingkungan hadir sebagai upaya menuntut dan mengupayakan kesadaran perusahaan untuk bertanggung jawab, baik sosial maupun lingkungan. Karenanya, sebagai perusahaan yang beroperasi dan berhubungan langsung dalam pengelolaan sumber daya alam, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT HNAI) mempunyai tanggung jawab yang sama.

Berkaitan dengan itu, Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, Ir. Sunarto S.T., M.M., IPU AR menjelaskan bahwa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sendiri belum mempunyai laporan biaya lingkungan khusus sebagaimana yang dimaksudkan dalam sistem akuntansi lingkungan. Meski demikian, Sunarto mengatakan bahwa PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia tetap mengeluarkan biaya-biaya lingkungan sejak proses pembangunan pabrik dan utilitasnya dimulai hingga selama proses operasional perusahaan berlangsung.

Selain itu, Sunarto juga memaparkan biaya-biaya lingkungan yang telah dikeluarkan oleh perusahaan. Hal ini berdasarkan pada wawancara dengan Sunarto sebagai Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Dari wawancara tersebut didapatkan beberapa klasifikasi biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, sebagai berikut:

##### 3.1.1 Biaya Pencegahan Lingkungan

PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia mengeluarkan biaya pencegahan lingkungan dalam bentuk biaya sewa konsultan lingkungan dan biaya perizinan lingkungan. Bila merujuk contoh pencegahan lingkungan yang diberikan oleh ahli akuntansi manajemen, Hansen dan Mowen, biaya sewa konsultan lingkungan yang dikeluarkan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dapat diartikan sebagai biaya audit risiko lingkungan. Sedangkan untuk biaya perizinan lingkungan yang dikeluarkan perusahaan, memiliki tujuan guna mendapat izin lingkungan. Ini merupakan syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan konstruksi dan operasi.

##### 3.1.2 Biaya Deteksi Lingkungan

Biaya deteksi lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia berupa biaya analisa air limbah tiap bulan, serta biaya pemantauan lingkungan. Untuk biaya analisa air limbah, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- setiap bulan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bantaeng, Nasir Awing, mengatakan bahwa:

“Dia harus tiap bulan diuji sampelnya itu. Udara, tanah, air, limbah B3-nya. Itu secara rutin memang kita ambil. Kemudian terakhir, memang belum ada yang melewati ambang baku mutu.” (Wawancara, 3 Agustus 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan, Pasal 1 Ayat 11, Baku Mutu Air Limbah sendiri merupakan ukuran batas atau kadar unsur pencemar dan/atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam air limbah yang akan dibuang atau dilepas ke dalam media air dan tanah dari suatu usaha dan/atau kegiatan. Singkatnya, baku mutu air limbah adalah alat ukur untuk mengetahui tingkat pencemaran, pada air limbah. Begitu pun dengan dampak udara dan dampak tanah, yang diukur dengan menggunakan baku mutu masing-masing.

Sedangkan untuk biaya pemantauan lingkungan, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia rutin mengeluarkan per enam bulan, periode Januari-Juni dan Juli-Desember. Mengenai hal ini, ada fakta menarik yang didapatkan di lapangan. Terdapat alihfungsi jalan di Jalan Dusun Mawang. Sebelumnya, Jalan Dusun Mawang merupakan jalan umum, namun kemudian dialihfungsikan sebagai jalan perusahaan sementara waktu, selama proses konstruksi jalan pabrik berlangsung.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, pasal 1 ayat 5 menjelaskan bahwa jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Selanjutnya ayat 6 menjelaskan bahwa yang dimaksud jalan khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok, masyarakat untuk kepentingan sendiri. Lebih rinci pada pasal 6 ayat 3, dalam undang-undang yang sama, dijelaskan bahwa jalan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 6, bukan jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan.

Bila berdasar pada undang-undang tersebut, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia harusnya membangun jalan khusus untuk kepentingan distribusi barang dan jasa yang dibutuhkannya. Perusahaan sendiri mengaku mengeluarkan biaya pemantauan lingkungan secara rutin yang diperuntukkan untuk memantau segala dampak penting terhadap lingkungan atas operasi perusahaan agar dapat ditanggulangi secara efektif. Namun dalam temuan lapangan, pemantauan lingkungan seolah tidak memberi efek signifikan pada lingkungan sekitar kawasan perusahaan.

Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya keluhan warga di dusun Mawang yang muncul. Ibu Lagi Ria, warga dusun Mawang, mengungkapkan bahwa sumur miliknya, dan beberapa sumur milik warga lain di dusun Mawang mengalami kekeringan semenjak perusahaan beroperasi. Kekeringan tersebut memaksa para warga membeli air dari dusun lain untuk kepentingan sehari-hari. Bukan hanya itu, karena kekeringan itu pula, produksi batu merah yang merupakan sumber pendapatan warga harus berhenti, produksi batu merah menjadi tidak menentu lagi disebabkan kelangkaan air.

Mengenai kekeringan ini, Sunarto mengatakan bahwa perusahaan telah menanganinya dengan membuat sumur baru di dusun Mawang dan dusun Balla Tinggia. Masing-masing dusun mendapat satu sumur bor, di mana perusahaan menanggung pompa, listrik dan tandonnya. Namun sumur bor buatan perusahaan tidak terlalu difungsikan warga karena airnya yang sedikit. Kondisi ini membuat pemerintah desa Papan Loe kemudian harus ikut dalam program PAMSIMAS. PAMSIMAS merupakan program pemberdayaan masyarakat di bidang air minum dan sanitasi yang melibatkan masyarakat secara aktif, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pemeliharaan dan pengelolaan. Program ini membantu masyarakat dusun Mawang mendapat akses air bersih setelah kekeringan sumur yang terjadi setelah perusahaan beroperasi.

Dampak lain yang timbul setelah beroperasinya perusahaan adalah debu tebal yang mudah ditemukan dalam rumah warga. Debu tersebut memenuhi lantai, dinding, meja dan kursi di ruang tamu warga. Sebagai gambaran tebalnya debu yang ada, warga di dusun Mawang harus menyapu dan mengepel lantai sebanyak tiga kali sehari, atau bahkan lima kali sehari untuk mengurangi debu yang ada dalam rumah.



Gambar 1. Kaos kaki peneliti setelah menginjak lantai rumah warga

Mengutip Tempo.co, Jumat (2/9/2022) tanah galian/material yang mengandung bijih nikel, saat musim hujan, menyebabkan banjir lumpur ke jalan dan pemukiman. Ketika kemarau, tanah itu meruapkan debu yang menempel di lantai dan perabotan rumah penduduk.

Dampak lain yang ditimbulkan akibat beroperasinya perusahaan adalah kebisingan, getaran dan bau yang cukup menyengat. Menurut salah satu warga dusun Mawang, bau yang terasa sampai dapat membuat kepala menjadi pusing. Sedangkan getarannya yang apabila terus-menerus terjadi ditakutkan mengakibatkan cedera, gangguan tulang belakang, dan gangguan kesehatan lain. Seperti gangguan penglihatan, kandung kemih, darah dalam urin dan cedera vascular (pembuluh darah) (Pramuditta & Kunaefi, 2016).

Beberapa dampak yang telah disebutkan sebelumnya menggambarkan bahwa efek dari biaya pemantauan lingkungan yang dikeluarkan perusahaan belum mampu meminimalisir dengan efektif dampak lingkungan yang dirasakan warga sekitar kawasan industri.

### *3.1.3 Biaya Kegagalan Internal Lingkungan*

Ada beberapa bentuk biaya kegagalan internal lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Beberapa biaya itu yakni biaya pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, biaya perawatan fasilitas lingkungan, biaya pengelolaan sampah, biaya operasional mobil pengangkut sampah, dan biaya pengangkutan sampah di TPS Huadi ke TPA Bantaeng.

Tidak diketahui nominal berapa biaya kegagalan internal lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, namun Sunarto menuturkan soal prosedur pengangkutan dan pengelolaan limbah B3 PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, dalam hal ini slag (limbah padat), perusahaan tidak mengelola limbahnya secara langsung namun diserahkan ke pihak ke tiga yang berizin. Hal ini dikarenakan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia hanya memiliki izin Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) untuk menampung. Sebelum slag diangkut untuk dikelola oleh pihak yang memiliki izin pengelolaan, perusahaan memeriksa izin pengangkutannya. Setelah limbah diangkut, perusahaan membuat laporan untuk diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng, provinsi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun prosedur untuk ke empat biaya kegagalan internal lingkungan yang lain, tidak dijelaskan dengan rinci oleh Sunarto.

### *3.1.4 Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan*

Biaya kegagalan eksternal lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ialah biaya operasional mobil tangki penyiram jalan dan biaya pemeriksaan kesehatan gratis. Penyiraman jalan yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini bertujuan untuk mengurangi dampak debu yang timbul akibat aktivitas dari perusahaan. Pelaksanaan kegiatan penyiraman jalan ini beberapa kali ditekankan oleh Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantaeng kepada pihak PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia.

Meski penyiraman jalan dilakukan oleh pihak perusahaan, tidak serta merta secara efektif meminimalisir dampak taburan debu ke rumah-rumah warga. Olehnya, selain melakukan penyiraman, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia juga menyediakan klinik kesehatan gratis bagi pekerja dan warga terdampak.

Aspek kesehatan menjadi salah satu aspek yang sangat krusial diperbincangkan, khususnya pada daerah-daerah pertambangan. Menurut Sholihah et al. (2008) aktivitas pertambangan dan smelter banyak menimbulkan masalah kesehatan. Di sekitar kawasan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sendiri, dampak debu menyebabkan warga merasakan gatal-gatal pada kulit, batuk yang berlangsung berbulan-bulan dan penurunan ketahanan tubuh. Menurut keterangan salah satu narasumber, efek kesehatan akibat debu tersebut juga dikuatkan dengan diagnosis dokter yang bekerja di klinik kesehatan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia.

Dari uraian di atas, secara garis besar biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Biaya lingkungan yang dikeluarkan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia

Jenis Biaya Lingkungan	Aktivitas Lingkungan
Biaya Pencegahan Lingkungan	Biaya sewa konsultan lingkungan & biaya perizinan lingkungan
Biaya Deteksi Lingkungan	Biaya analisa air limbah tiap bulan & biaya pemantauan lingkungan tiap semester
Biaya Kegagalan Internal Lingkungan	Biaya pengangkutan dan pengelolaan limbah B3; biaya perawatan fasilitas lingkungan; biaya pengelolaan sampah; biaya operasional mobil pengangkut sampah; & biaya pengangkutan sampah di TPS Huadi ke TPA Bantaeng
Biaya Kegagalan Eksternal Lingkungan	Biaya operasional mobil tangki penyiram jalan & biaya pemeriksaan kesehatan gratis

### 3.2 Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia

#### 3.2.1 Komunikasi

Dalam konteks kolaborasi penerapan akuntansi lingkungan, suatu komunikasi antar stakeholder (internal dan eksternal) harus dibangun lebih awal agar dapat menciptakan pembagian informasi yang adil antar stakeholder. Hal ini dapat menjaga hubungan mereka sebagai aktor dalam suatu kolaborasi.

Dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) kegiatan pabrik/smelter PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, disebutkan bahwa pada tahap pra-konstruksi, perusahaan harus melakukan kegiatan sosialisasi rencana proyek pembangunan pabrik nikel. Kegiatan sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat di sekitar tapak proyek. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk menjelaskan secara detail kepada masyarakat tentang rencana pembangunan dan menjelaskan dampak yang ditimbulkan kepada masyarakat serta meminta persetujuan kepada masyarakat di sekitar rencana kegiatan.

Namun berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa warga yang tinggal di sekitar tapak proyek, didapatkan keterangan bahwa tidak ada sosialisasi dari pihak PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia kepada masyarakat untuk menjelaskan bahwa akan ada pembangunan pabrik nikel oleh perusahaan. Warga yang menjual tanahnya ke perusahaan tidak mengetahui untuk diapakan tanah itu setelah dibeli oleh perusahaan.

Ibu Lagi Ria menuturkan bahwa ia bahkan tidak akan menjual tanahnya seandainya pihak PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia menjelaskan di awal perihal peruntukan tanah yang mereka beli. Warga lain di sekitar tapak proyek, Fitriani S., mengaku bahwa awalnya ia mengira yang hendak dibangun di lahan yang sudah dibebaskan itu adalah kampus, lantaran bangunan yang pertama dibangun adalah sebuah asrama. Namun belakangan diketahui asrama itu adalah tempat menginap para pekerja pabrik.

Pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, dalam pasal 9 disebutkan bahwa pemrakarsa harus mengikutsertakan masyarakat dalam penyusunan dokumen AMDAL. Mengikutsertakan masyarakat, dalam hal ini berarti pemrakarsa sudah harus melibatkan masyarakat mulai dari proses sosialisasi, konsultasi publik, sampai pada penyusunan dokumen kerangka acuan (masyarakat berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut).

Namun jangankan untuk terlibat dalam proses penyusunan dokumen AMDAL PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, masyarakat bahkan tidak mendapatkan sosialisasi mengenai apa

yang akan dibangun serta dampak-dampak apa saja yang mungkin timbul dan dirasakan oleh masyarakat terkait dengan pembangunan proyek tersebut. Hal ini membuat masyarakat sama sekali tidak tahu mengenai informasi terkait pembangunan proyek tambang.

Bila dihubungkan dengan konsep kolaborasi, maka PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia tidak melakukan komunikasi secara baik dengan stakeholder dalam proses kolaborasinya. Sebab, kolaborasi mensyaratkan komunikasi dua arah dan pengaruh antara lembaga dan pemangku kepentingan serta peluang bagi pemangku kepentingan untuk berbicara satu sama lain (Ansell & Gash, 2007).

### 3.2.2 Pemahaman Bersama

Berdasarkan hasil wawancara dengan semua narasumber dalam penelitian ini, baik dari stakeholder internal dan stakeholder eksternal, diperoleh kesimpulan bahwa semua stakeholder memiliki pemahaman yang sama terkait makna lingkungan. Menurut Sunarto, selaku perwakilan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, keberadaan lingkungan sangat penting, apalagi mengenai peran lingkungan bagi keberlanjutan perusahaan. Hal ini dapat dilihat dari beragam peraturan terkait lingkungan hidup. Gambaran mengenai pentingnya lingkungan bagi PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia karena telah terikat dengan berbagai undang-undang dan peraturan, tergambar dalam pernyataan Sunarto berikut:

“Oh iya sangat penting lah. Itu diatur dalam UU, ada aturannya di PERMEN LHK. Artinya, kalau kita analisis itu bahwa pemerintah sangat memperketat pengelolaan lingkungan di dalam bentuk UU dengan peraturan pemerintah dan turunannya. Artinya itu lingkungan sangat penting.” (Wawancara, 2 Agustus 2022).

Peraturan yang dimaksud oleh Sunarto dalam pernyataannya tersebut adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari pihak pemerintah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng menyebutkan bahwa pemerintah telah memberi saran kepada PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam kaitannya dengan peningkatan pengelolaan lingkungan dengan meningkatkan anggaran lingkungan perusahaan. Upaya tersebut hadir didasarkan pada pemahaman mengenai pentingnya peran lingkungan. Hal serupa juga hadir dalam pandangan masyarakat. Masyarakat sekitar kawasan industri juga memahami bahwa lingkungan sebagai sebuah sumber kehidupan memegang peran penting.

Tiga pandangan di atas, menunjukkan bahwa sebenarnya terdapat kolaborasi pemahaman di antara stakeholder yang ada. Namun pemahaman tersebut tidak lahir dari forum-forum khusus yang dibuat untuk membahas pandangan masing-masing stakeholder terkait lingkungan.

### 3.2.3 Dialog Antar Muka

Berdasarkan keterangan oleh narasumber dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, didapatkan penjelasan bahwa hampir semua jenis komunikasi digunakan oleh perusahaan untuk berkomunikasi dengan stakeholder-nya. Namun yang paling sering digunakan ialah komunikasi tatap muka atau dialog tatap muka. Hal ini relevan dengan hasil wawancara dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantaeng yang menyebutkan bahwa setiap ada hal-hal yang berpotensi mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan atau degradasi, DLH segera mengkoordinasikan dengan pihak yang terkait.

Banyak komplain dari masyarakat yang ditujukan kepada PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia (PT HNAI). Berdasarkan wawancara dengan Kepala DLH Kabupaten Bantaeng, sebagai pihak yang berwenang dalam mengawasi kegiatan pengelolaan lingkungan PT HNAI, didapatkan informasi bahwa PT HNAI belum menyelesaikan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) perusahaan. Padahal dalam lampiran dokumen Izin

Lingkungan perusahaan yang dikeluarkan oleh gubernur Sulawesi Selatan, disebutkan bahwa perusahaan yang diberi izin lingkungan wajib membangun IPAL agar limbah cair yang dihasilkan selama beroperasi dapat diproses melalui IPAL sebelum dibuang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Papan Loe, didapatkan keterangan bahwa saat warga mengadu terkait dampak yang dirasakan, pemerintah desa menyampaikan aspirasi tersebut ke pihak perusahaan melalui musyawarah, begitu pun ke pemerintah yang tingkat wewenangnya lebih tinggi (kecamatan dan kabupaten). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Papan Loe, dikatakan juga bahwa dialog tatap muka lebih banyak terjadi setelah masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Dari keterangan-keterangan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia berkolaborasi, dalam hal dialog tatap muka. Namun dialog tatap muka tersebut, biasanya terjadi setelah adanya aksi massa oleh masyarakat.

#### 3.2.4 Tujuan Bersama

Dalam konsep kolaborasi, tujuan bersama diartikan sebagai visi bersama yang lahir dari hasil berunding antar aktor kolaborasi. Tujuan bersama ini yang kemudian menjadi faktor kunci keberhasilan suatu kolaborasi, sebab tujuan bersama mempunyai kekuatan untuk membuat para aktor tetap bersama hingga tujuan tersebut tercapai.

Temuan penelitian menunjukkan, pada awalnya tidak ada tujuan bersama secara khusus yang dibangun oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dengan para stakeholder-nya, utamanya dalam hal penerapan akuntansi lingkungan. PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia mengeluarkan biaya lingkungan berdasarkan kebutuhan pemenuhan syarat untuk memperoleh izin lingkungan, begitu juga dengan sewa konsultan lingkungan dan pengeluaran biaya lingkungan lain yang diperlukan hanya sebatas untuk memperoleh izin lingkungan.

Seiring dengan berlangsungnya kegiatan produksi perusahaan yang menimbulkan beberapa dampak lingkungan, muncul berbagai protes dari masyarakat dan peringatan dari pemerintah, hal ini yang kemudian menciptakan ruang dialog bagi para stakeholder untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Dari ruang dialog inilah terbentuk suatu konsensus atau tujuan bersama. Tujuan bersama stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini ialah menciptakan lingkungan yang aman bagi semua makhluk.

Proses pembentukan konsensus antara stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia ini sejalan dengan pendapat Thomson & Perry (2006) yang mengatakan kolaborasi dapat terjadi seiring berjalannya waktu ketika organisasi tersebut berinteraksi baik secara formal maupun secara informal dengan para stakeholder-nya melalui proses negosiasi yang dilakukan berulang-ulang, serta pengembangan dan pelaksanaan komitmen.

#### 3.2.5 Membangun Kepercayaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, didapatkan keterangan bahwa cara atau motivasi PT HNAI membangun kepercayaan dalam kolaborasinya ialah dengan menjaga kesadaran akan dampak lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya. Selain itu dijelaskan pula bahwa perusahaan sadar dengan peraturan yang mengatur soal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Hal ini membuat PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia harus melakukan banyak upaya dalam pertanggungjawaban lingkungannya. Hingga upaya-upaya itu dapat terlihat oleh para stakeholder-nya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLH kabupaten Bantaeng, diperoleh penjelasan mengenai kewenangan pemerintah daerah yang kini semakin sedikit. Dalam artian jika merujuk pada peraturan yang berlaku sekarang, wewenang pemerintah daerah (DLH) dalam mengawasi dan mengambil tindakan lingkungan hanya sampai pada kawasan dengan luas 1 hektar saja. Kawasan yang luasnya di atas 1 hektar, sudah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Hal ini berarti PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di bawah

kewenangan pemerintah provinsi serta di bawah kewenangan pemerintah pusat karena PT HNAI ini masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun meskipun Dinas Lingkungan Hidup kabupaten Bantaeng tidak punya wewenang dalam mengambil/memutuskan tindakan terhadap PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, ia tetap punya kewenangan dalam mengawasi PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sebagai perusahaan yang letaknya berada di kabupaten Bantaeng. Jika terlihat ada kondisi-kondisi yang dicurigai berdampak ke lingkungan, DLH kabupaten Bantaeng segera mengkoordinasikan dengan pemerintah pusat melalui DPLH provinsi.

Sedangkan upaya yang dilakukan masyarakat di desa Papan Loe sebagai stakeholder eksternal dalam membangun kepercayaan ialah dengan mempercayai aktor kolaborasi yang lain namun tetap memperhatikan dampak lingkungan yang ada, untuk kemudian disampaikan kepada pihak PT HNAI juga kepada pemerintah yang punya kewenangan dalam menentukan kebijakan.

### 3.2.6 Dimensi Mutualitas

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, didapatkan penjelasan bahwa kehadiran PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia tentu membawa dampak positif bagi pemerintah dan masyarakat. Dijelaskan bahwa dampak positif itu ialah meningkatnya pendapatan daerah serta pendapatan masyarakat Bantaeng yang menjadi pekerja di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia.

Mengenai dimensi mutualitas yang dirasakan pemerintah ini, dijelaskan oleh Kepala DLH kabupaten Bantaeng berikut:

“Nah di sisi lain, harus juga kita akui bahwa dengan keberadaan Huadi itu sangat membantu Bantaeng. Tahun 2021 kita punya pertumbuhan ekonomi 8,86%. Ternyata 2% sumbangan dari Huadi. Itu baru dampak statistik. Yang kedua, pajak penerangan jalan. Huadi ini sudah menyetor sekarang 3,5 miliar per bulan. Diperkirakan tahun 2025, karena saya baru-baru telah mewakili Bupati ke Bulukumba peluncuran electrical pH-nickel, tegangan listrik. Saya ketemu dengan orang PLN Bulukumba, bahwa tahun 2025 Huadi itu menggunakan 500 megawatt. Sekarang posisi Huadi kan 120 megawatt, untuk Bantaeng secara keseluruhan (puncak pemakaian kalau malam hari), puncak pemakaian listrik yah, sekabupaten Bantaeng ini, antara jam 19:00-21:00 kita cuma menggunakan 10-12 megawatt. Itu Huadi sudah menggunakan 120 megawatt sekarang. Berarti sudah sepuluh kali Bantaeng.”

Dengan kondisi yang demikian, menurut perkiraan Kepala DLH kabupaten Bantaeng, di tahun 2025 pajak penerangan jalan umum yang akan disetor PT HNAI ke pemerintah daerah kemungkinan akan sebesar dua puluh lima sampai tiga puluh miliar per bulan. Oleh karena itu Kepala DLH kabupaten Bantaeng mengaku sangat bersyukur dengan sumbangsih yang diberikan PT HNAI kepada Bantaeng. Menurutnya pula, perputaran ekonomi di kabupaten Bantaeng membaik seiring dengan penerimaan tenaga kerja PT HNAI yang 75% diisi oleh masyarakat Bantaeng.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar tapak proyek, diperoleh keterangan yang sama dengan pernyataan Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT HNAI dan Kepala DLH kabupaten Bantaeng, bahwa tenaga kerja yang diprioritaskan diterima di PT HNAI ialah masyarakat Bantaeng. Keterangan-keterangan ini memang dapat menggambarkan bahwa terdapat dimensi mutualitas pada kolaborasi stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Namun di lain sisi, hal ini tidak dapat menggugurkan fakta bahwa tidak semua stakeholder (khususnya masyarakat) merasakan dimensi mutualitas yang dimaksud ini. Sebabnya, bukan hanya karena tidak semua masyarakat dapat bekerja di PT HNAI, tapi karena masyarakat lebih banyak merasakan dampak negatif bagi lingkungan sumber penghidupannya sejak kehadiran PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia di wilayah mereka.

### 3.2.7 Komitmen pada Proses Kolaborasi

Hasil wawancara dengan Sunarto, selaku Kepala Bagian Pengelola Lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan PT HNAI sebagai bentuk komitmennya pada proses kolaborasi dalam penanggulangan kerusakan lingkungan ialah dengan mengelola dampak lingkungan yang ada, seperti dampak udara dan dampak air. Untuk dampak udara, PT HNAI memesan beberapa alat untuk mengendalikan emisi, seperti multi sicron, back house filter, separator siclon, dan bak reduksi. Sedangkan untuk dampak air, PT HNAI memiliki set lincoln dan oil tree.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala DLH kabupaten Bantaeng selaku stakeholder eksternal, didapatkan keterangan mengenai upaya pemerintah dalam menjaga komitmennya terhadap pengawasan pengelolaan lingkungan hidup. Upaya tersebut dijelaskan oleh Nasir Awing sebagai berikut:

“Ada organ pemerintah pusat di bawah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, ada namanya balai GAKKUM. Itu balai GAKKUM itu balai penegakan hukum. Itu berkumpul menjadi tim itu, termasuk di antaranya dari kepolisian. Itu yang kalau dia melihat di Huadi ada dalam kegiatan usahanya terdapat dampak yang menyebabkan degradasi lingkungan yang parah, menyebabkan kerugian harta benda bahkan nyawa manusia, maka tidak segan-segan balai GAKKUM itu akan menghentikan. Menghentikan itu kegiatan operasional.” (Wawancara, 3 Agustus 2022).

Dijelaskan pula oleh Nasir Awing bahwa upaya seperti itu sudah dilakukan pemerintah pusat di berbagai kabupaten dan kota. Menurutnya jika kewenangan mengawasi itu diserahkan ke Dinas Lingkungan Hidup atau pemerintah daerah kabupaten Bantaeng, untuk sementara waktu tidak mungkin pemerintah daerah mampu, baik dari sumber daya maupun sarana prasarana yang dibutuhkan (termasuk keuangan). Namun meskipun demikian, disebutkan Nasir bahwa keinginan dari pemerintah daerah untuk mengatur dan melakukan pengawasan secara penuh, tentu ada, tetapi masih butuh waktu.

Sedangkan masyarakat dalam rangka menjaga komitmennya di dalam kolaborasi, masyarakat tetap mengamati dengan seksama dampak-dampak lingkungan yang dirasakan dan disaksikan, dengan harapan dapat ditindak lanjuti oleh pihak yang berwajib dan berwenang.

### 3.2.8 Dampak Sementara

Dampak sementara dalam sebuah kolaborasi terjadi selama proses kolaborasi berlangsung. Dampak sementara dalam kolaborasi dapat diartikan sebagai kemenangan kecil yang mampu dirasakan oleh semua aktor kolaborasi. Kemenangan kecil yang dimaksud yakni hasil-hasil positif yang dapat terus menjaga semangat para aktor. Namun meskipun dengan pengertian demikian, pada faktanya karakteristik dampak ada yang diharapkan, yang tidak diharapkan dan tidak terduga. Dalam kasus kolaborasi stakeholders PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, dampak yang tidak diharapkan lebih banyak terjadi.

Hal ini dapat dilihat pada bagian pembahasan sebelumnya yang mengulas dampak-dampak negatif lingkungan yang muncul dan belum tertangani dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu warga desa Papan Loe yang kontra dengan sikap PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, Qalbi, diperoleh keterangan soal dampak yang tidak terduga dari kolaborasi ini, yaitu ketika terjadi aksi massa yang menuntut beberapa hal seperti kompensasi, air bersih, dan lain-lain, respon perusahaan bukan segera membayar kompensasi atau menyediakan air bersih, namun menawarkan agar orang-orang yang memimpin aksi tersebut merekomendasikan nama-nama keluarganya untuk direkrut sebagai pekerja. Menurut Qalbi, tawaran tersebut tidak mewakili semua kehendak warga, sebab tidak sedikit warga Papan Loe yang memiliki kesadaran terkait lebih dibutuhkannya penanganan dampak lingkungan yang tepat daripada hal-hal lainnya.

### 3.3 Urgensi Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia

Menilik pembahasan sebelumnya pada bagian-bagian sub bab kedua dari bab ini, telah dijelaskan sesuai dengan temuan lapangan soal bagaimana model penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, serta bagaimana model kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Diperoleh beberapa fakta dalam kasus ini, yakni fakta positif dan fakta negatif. Pada bagian ini, pembahasan akan lebih difokuskan pada fakta negatif dikarenakan keberadaannya yang masih perlu dipertanyakan guna mencari jalan keluar.

Untuk memberi gambaran model penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, penting kiranya untuk menyertakan kutipan wawancara dengan Sekretaris Desa Papan Loe berikut:

“Ini juga kami di desa, satu tahun terakhir ini, solusi yang kami lakukan di dusun Mawang untuk ketersediaan air minum mereka, kami di sini pernah air bersihnya itu dari program PAMSIMAS. Programnya kabupaten bersama pemerintah desa. Itu yang napake sekarang warga di Mawang. Itu solusi. Karena seandainya mungkin tidak ada air PAMSIMAS ke sana, saya nda tahu bagaimana di sana di Mawang itu.” (Wawancara, 4 Agustus 2022).

Dari pernyataan tersebut, tergambar bahwa model penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, belum mencapai titik manfaatnya. Argumen tersebut hanya merupakan salah satu dari argumen yang membantu proses penganalisisan terhadap penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Fakta-fakta lapangan dan argumen-argumen narasumber lain yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, turut menguatkan temuan terkait efek dari biaya pemantauan lingkungan yang dikeluarkan perusahaan sebagai salah satu langkah dalam penerapan akuntansi lingkungan, belum mampu meminimalisir dampak lingkungan yang dirasakan warga.

Dikatakan belum mampu meminimalisir dampak lingkungan yang ada, sebab warga desa Papan Loe terus merasakan dampak berupa kebisingan, getaran, bau, debu, kekeringan air sumur, kerusakan jalan umum desa dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar pabrik yang kian menurun dari hari ke hari akibat beroperasinya perusahaan.

Model kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia sendiri, tergambar dalam pernyataan Kepala Desa Papan Loe berikut:

“Seharusnya, sebelum melakukan pembangunan perusahaan, pihak perusahaan harus menyosialisasikannya dulu kepada warga. Apa yang akan dibangun, kira-kira dampaknya nanti seperti apa, supaya warga sudah tahu sebelumnya. Persiapannya itu tidak ada.” (Wawancara, 4 Agustus 2022).

Pernyataan di atas menggambarkan tidak terpenuhinya salah satu syarat kolaborasi jika diukur menggunakan komponen-komponen kolaborasi yang telah dielaborasi peneliti untuk digunakan di dalam penelitian ini. Suatu kolaborasi haruslah dimulai dengan bangunan komunikasi yang intensif, agar dapat menciptakan informasi yang adil dan berimbang antar stakeholder. Meskipun pada bagian-bagian pembahasan sebelumnya, telah dijelaskan pula temuan lapangan yang mengungkap adanya dialog antar muka yang terjalin antar stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, belum cukup membuat kolaborasi ini dapat dikatakan berjalan dengan baik, sebab dialog antar muka tersebut baru terjadi setelah aksi protes warga karena dampak lingkungan yang dirasakan.

Keterangan lain soal kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Lagi Ria:

“Eee dikasih air dari dalam, tidak mempan juga, karena dua hari pi baru ke sini kalau ditelepon. Kalau nda ditelepon, nda ke sini. Itu makanya tidak mempan.” (Wawancara, 30 Juli 2022).

Tergambar dalam pernyataan Lagi Ria tersebut, tersirat kekecewaan ketika menggambarkan respon perusahaan atas kasus kekeringan air sumur yang menimpa warga

di sekitar tapak proyek. Jika konteks ini dihubungkan dengan teori stakeholder, maka perusahaan mestinya lebih memperhatikan setiap keluhan yang datang dari warga sekitar tapak proyek. Sebab menurut teori stakeholder, keberadaan setiap perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan kelompok-kelompok yang ada di sekitarnya. Kelompok yang dimaksud di sini ialah stakeholder yang ada di dalam maupun di luar perusahaan yang punya peran dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan.

Pada umumnya, stakeholder internal dan stakeholder eksternal memiliki kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dan stakeholder eksternalnya, juga memiliki kepentingan yang berbeda. Namun meskipun demikian, baik PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia pun stakeholder eksternalnya, memiliki kebutuhan yang sama terhadap keberlangsungan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kolaborasi dalam proses pencapaian tujuan bersama dalam hal pemeliharaan kelestarian lingkungan sebagai sumber penghidupan semua makhluk.

Secara ringkas model penerapan akuntansi lingkungan, kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan, dan urgensi kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Pokok model penerapan akuntansi lingkungan, kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan, dan urgensi kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT HNAI

No	Fakta Penerapan Akuntansi Lingkungan dan Fakta Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Akuntansi Lingkunga	Urgensi Kolaborasi Stakeholder dalam Penerapan Akuntansi Lingkungan
1.	<p>Penerapan akuntansi lingkungan yang dilakukan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum mencapai titik manfaatnya. Fakta-fakta lapangan dan argumen-argumen narasumber dalam penelitian menguatkan temuan terkait efek dari biaya pemantauan lingkungan yang dikeluarkan perusahaan sebagai salah satu langkahnya dalam penerapan akuntansi lingkungan, belum mampu meminimalisir dampak lingkungan yang dirasakan warga. Dikatakan belum mampu meminimalisir dampak lingkungan yang ada, sebab warga desa Papan Loe terus mengeluhkan dampak berupa kebisingan, getaran, bau, debu, kekeringan air sumur, kerusakan jalan umum desa dan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar pabrik yang kian menurun dari hari ke hari akibat dari operasi perusahaan.</p>	<p>Mengetahui bahwa akuntansi lingkungan ialah upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh aktivitas operasi perusahaan dengan cara memasukkan biaya-biaya lingkungan ke dalam sistem akuntansi, tidaklah dapat dengan mudah terwujud dikarenakan adanya perbedaan kepentingan antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, perusahaan selalu memprioritaskan peningkatan laba dibanding menjamin keberlanjutan lingkungan, sedangkan masyarakat sekitar lokasi perusahaan memiliki harapan keberadaan lingkungan yang sehat sebagai sumber penghidupan masyarakat dan entitas hidup yang lain. Namun meskipun demikian, baik perusahaan pun masyarakat memiliki kebutuhan yang sama terhadap keberlangsungan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kolaborasi atau bangunan kerja sama yang mengakar dan adil di antara stakeholder dalam mewujudkan akuntansi lingkungan.</p>
2.	<p>Kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat kolaborasi (komponen-komponen kolaborasi). Dikatakan belum sepenuhnya memenuhi syarat kolaborasi, sebab:</p>	

- 
- Komunikasi yang terjalin antar stakeholder tidak intensif.
  - Kesamaan pemahaman stakeholder terkait lingkungan tidak lahir dari satu forum khusus yang membahas soal pandangan-pandangan dari masing-masing stakeholder mengenai lingkungan.
  - Dialog antar muka yang terjalin antar stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia baru terjadi setelah aksi protes terhadap dampak lingkungan dilakukan warga.
  - Pada awalnya, tidak ada tujuan bersama secara khusus yang dibangun oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dengan para stakeholder-nya dalam hal penerapan akuntansi lingkungan. Namun seiring dengan kegiatan produksi perusahaan yang menimbulkan beberapa dampak lingkungan, sehingga memicu protes dari masyarakat dan peringatan dari pemerintah, membuat terciptanya ruang berdialog bagi para stakeholder untuk menyampaikan aspirasinya masing-masing. Dari ruang dialog inilah baru kemudian terbentuk suatu konsensus atau tujuan bersama.
  - Dampak sementara dari kolaborasi yang terjalin antar stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan belum didominasi oleh dampak yang diharapkan, namun lebih banyak didominasi oleh dampak yang tidak diharapkan dan dampak yang tidak terduga.
- Dengan demikian, dapat terlihat bahwa dari 8 komponen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukur keberhasilan suatu kolaborasi, kolaborasi stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia hanya dapat memenuhi 3 komponen kolaborasi.
- 

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dimuat pada bab sebelumnya, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dalam penerapan akuntansi lingkungannya belum mempunyai laporan biaya lingkungan khusus. Biaya-biaya lingkungan yang dikeluarkan hanya dicatat dalam akun biaya lingkungan pada laporan keuangan perusahaan. Adapun laporan keuangan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia tidak dapat diakses oleh peneliti. Selain itu, efek dari biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia, belum mampu meminimalisir secara signifikan dampak lingkungan yang dirasakan warga. Kolaborasi stakeholder dalam penerapan akuntansi lingkungan di PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia belum sepenuhnya memenuhi syarat kolaborasi (komponen-komponen kolaborasi).

Sebab idealnya dari 8 komponen yang digunakan dalam penelitian ini sebagai alat ukur keberhasilan suatu kolaborasi, kolaborasi stakeholder PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia hanya dapat memenuhi 3 komponen kolaborasi. Komponen-komponen tersebut yaitu: membangun kepercayaan, dimensi mutualitas, dan komitmen pada proses kolaborasi. PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia dan stakeholder eksternalnya memiliki kepentingan yang berbeda. Namun meskipun demikian, baik PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia pun stakeholder eksternalnya, memiliki kebutuhan yang sama terhadap keberlangsungan lingkungannya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kolaborasi antar stakeholder dalam proses pencapaian tujuan bersama dalam hal pemeliharaan kelestarian lingkungan sebagai sumber kehidupan semua makhluk.

### **Kontribusi Penulis**

Semua penulis berkontribusi penuh atas penulisan artikel ini.

### **Pendanaan**

Penelitian ini tidak menggunakan pendanaan eksternal.

### **Pernyataan Dewan Peninjau Etis**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Persetujuan yang Diinformasikan**

Tidak berlaku.

### **Pernyataan Ketersediaan Data**

Tidak berlaku.

### **Konflik Kepentingan**

Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

### **Akses Terbuka**

©2024. Artikel ini dilisensikan di bawah Lisensi International Creative Commons Attribution 4.0, yang mengizinkan penggunaan, berbagi, adaptasi, distribusi, dan reproduksi dalam media dalam format apapun. Selama Anda memberikan kredit yang sesuai kepada penulis asli dan sumbernya, berikan tautan ke Lisensi Creative Commons, dan tunjukkan jika ada perubahan. Gambar atau materi pihak ketiga lainnya dalam artikel ini termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel tersebut, kecuali dinyatakan dalam batas kredit materi tersebut. Jika materi tidak termasuk dalam Lisensi Creative Commons artikel dan tujuan penggunaan Anda tidak diizinkan oleh peraturan perundang-undangan atau melebihi penggunaan yang diizinkan, Anda harus mendapatkan izin untuk langsung dari pemegang hak cipta. Untuk melihat lisensi ini kunjungi: <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

### **Referensi**

Abdullah, M. W., & Amiruddin, H. (2020). Efek Green Accounting terhadap Material Flow Cost Accounting dalam Meningkatkan Keberlangsungan Perusahaan. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 4(2), 166–186. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i2.4145>

- Adelina, F., & Arza, F. I. (2021). Pengaruh Intellectual Capital dan Corporate Social Responsibility terhadap Nilai Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2020. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 583-598. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.432>
- Agranoff, R. dan McGuire, M. 2003. Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments. Washington DC: Georgetown University Press. [https://books.google.co.id/books/about/Collaborative\\_Public\\_Management.html?hl=id&id=jG0e8rheLUC&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Collaborative_Public_Management.html?hl=id&id=jG0e8rheLUC&redir_esc=y)
- Anindita, R., & Hamidah, H. (2020). Akuntansi Lingkungan dalam Pitutur Luhur Kejawen. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 11(2), 278-296. <https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.17>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543-571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bahri, N. A. (2018). Bumi dan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 3(1), 37-48. <https://doi.org/10.34202/imanensi.3.1.2018.37-48>
- Bodgan, R. C. dan Biklen, S. K. 1982. Qualitative Research for Education. London: Allyn and Bacon, Inc. [https://math.buffalostate.edu/dwilson/MED595/Qualitative\\_intro.pdf](https://math.buffalostate.edu/dwilson/MED595/Qualitative_intro.pdf)
- Bukhori, M. R. T., & Sopian, D. (2017). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Report terhadap Kinerja Keuangan. *Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan*, 2(1), 35-48. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v2i1.62>
- Cooper dan Schindler. 2014. Bussiners Research Method. New York: McGraw-Hill. <https://contents.lspr.ac.id/2022/05/Donald-R-Cooper-Pamela-S-Schindler-Business-Research-Methods.pdf>
- Darwin, K. (2020). Islam dan Akuntabilitas Lingkungan: Suatu Tinjauan Teoritis. *AkMen*, 17(2), 205-217. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen/article/view/882>
- Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) PT Huadi Nickel-Alloy Indonesia. [https://amdal.menlhk.go.id/info\\_persuratan/](https://amdal.menlhk.go.id/info_persuratan/)
- Farida, D. N. (2019). Pengungkapan Lingkungan dan Etika Al Qur'an pada Perusahaan Tambang di Indonesia. *Jurnal Maksimum Media Akuntansi Universitas Muhammadiyah Semarang*, 9(1), 81-91. <https://doi.org/10.26714/mki.7.2.2017.81-92>
- Franciska, R. M., Sondakh, J. J., & Tirayoh, V. Z. (2019). Analisis Penerapan Akuntansi Biaya Lingkungan pada PT. Royal Coconut Airmadidi. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 14(1), 58-63. <https://doi.org/10.32400/gc.14.1.22287.2019>
- H, R. R., Afrizal, & Arum, E. D. P. (2019). Pengaruh Kepemilikan Manajemen serta Kepemilikan Institusional, Profitabilitas dan Kinerja Lingkungan (Environmental Performance) terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan Periode 2015-2017). 34-44. <https://doi.org/10.22437/jaku.v4i1.7427>
- Hati, R. P. (2018). Analisis Penerapan Green Accounting Berbasis University Social Responsibility (USR) pada Universitas Riau Kepulauan dan Universitas Internasional Batam. *Jurnal Measurement*, 12(1), 111-119. <https://doi.org/10.33373/mja.v12i1.1317>
- Indrawati, N. M., & Rini, I. G. A. I. S. (2018). Analisis Penerapan Akuntansi Lingkungan pada Badan Rumah Sakit Umum Daerah (BRSUD) Tabanan. *Jurnal KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 9(2), 85-95. <https://doi.org/10.22225/kr.9.2.480.85-95>
- Koroy, T. R. (2017). Analisis atas Elemen-elemen Pengungkapan atas Pelaporan Kinerja Diperluas pada Perusahaan-perusahaan Pertambangan di Indonesia. *JURNAL SPREAD*, 7(2), 145-158. <http://journal.stiei-kayutangi-bjm.ac.id/index.php/jibk/article/view/383>

- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.  
[https://books.google.co.id/books/about/Metode\\_penelitian\\_kualitatif.html?id=637LEAAAQBAJ&redir\\_esc=y](https://books.google.co.id/books/about/Metode_penelitian_kualitatif.html?id=637LEAAAQBAJ&redir_esc=y)
- Kusumawardani, A., Irwansyah, Setiawati, L., Ginting, Y. L., & Khairin, F. N. (2018). Urgensi Penerapan Pendidikan Akuntansi Berbasis Akuntansi Sosial dan Lingkungan. *Jurnal EKUITAS: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 65–82.  
<https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i1.3484>
- Maharani, P., & Handayani, S. (2021). Pengaruh Green Accounting pada Nilai Perusahaan Sektor Pertambangan. *EDUMASPUL Jurnal Pendidikan*, 5(1), 220–231.  
<https://doi.org/10.33487/edumaspul.v5i1.1141>
- Muliwati, A. R., & Hariyati. (2021). Pengaruh Koneksi Politik dan Media Exposure terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial. *Jurnal Akuntansi & Ekonomika*, 11(1), 72–81.  
<https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2509>
- Ningsih, W. F., & Rachmawati, R. (2017). Implementasi Green Accounting dalam Meningkatkan Kinerja Perusahaan. *Journal of Applied Business and Economics*, 4(2), 149–158. <https://doi.org/10.30998/jabe.v4i2.2142>
- Nursamsiah, A. I., Lutfi, A., Apriani, F. E., & Prawira, I. F. A. (2019). Pengaruh Implementasi Akuntansi Lingkungan terhadap Kinerja Perusahaan. *Organum: Jurnal Saintifik Manajemen Dan Akuntansi*, 02(02), 73–83.  
[https://www.researchgate.net/publication/338219542\\_Pengaruh\\_Implementasi\\_Akuntansi\\_Lingkungan\\_terhadap\\_Kinerja\\_Perusahaan](https://www.researchgate.net/publication/338219542_Pengaruh_Implementasi_Akuntansi_Lingkungan_terhadap_Kinerja_Perusahaan)
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengolahan Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan dengan Menggunakan Metode Lahan Basah Buatan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/210853/permen-lhk-no-5-tahun-2022>
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.  
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/5239/pp-no-27-tahun-2012>
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161852/pp-no-22-tahun-2021>
- Prakoso, C. T. 2017. Kerja Sama Antara Pemerintah, Perusahaan dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Kota Bontang. *Jurnal Paradigma*, 6(1): 22-35. <http://dx.doi.org/10.30872/jp.v6i1.444>
- Pramuditta, L., & Kunaefi, T. D. (2016). Pengaruh Paparan Getaran Mesin Terhadap Kelelahan dan Hand Arm Vibration Syndrome (HAVS) pada Pekerja Di Industri Beton Pracetak (Studi Kasus PT SCG Pipe And Precast Indonesia). *Jurnal Teknik Lingkungan*, 22(2), 42–51. <https://doi.org/10.5614/j.tl.2016.22.2.5>
- Qodriana, E. L., & Nurdiwaty, D. (2017). Akuntansi Lingkungan Kajian Penerapan pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI. *Jurnal Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Akuntansi (SENMEA)*, 4(1), 368–383.  
<https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/552>
- Rizki, A. N., & Firmansyah, A. (2021). Kewajiban Lingkungan atas Reklamasi dan Pasca Tambang pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Indonesia. *EKOMBIS Sains Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Bisnis*, 6(1), 37–54.  
<https://doi.org/10.24967/ekombis.v6i1.1117>
- Roberts, D., Wyk, R. van, & Dhanpat, N. (2016). Exploring Practices for Effective Collaboration. *Proceedings of the 28th Annual Conference of the Southern African Institute of Management Scientists*, September, 4–7. [http://mediachef.co.za/saims-2016/papers/HRL1\\_Full.pdf](http://mediachef.co.za/saims-2016/papers/HRL1_Full.pdf)
- Salim, & Syahrums. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Haidir (Ed.)). Cipustaka Media.  
[http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATI\\_F.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/552/1/METODOLOGI%20PENELITIAN%20KUALITATI_F.pdf)

- Sarwono, J. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif (Issue 112). [https://www.academia.edu/21354427/Metode\\_penelitian\\_kuantitatif\\_and\\_kualitatif\\_Jonathan\\_Sarwono](https://www.academia.edu/21354427/Metode_penelitian_kuantitatif_and_kualitatif_Jonathan_Sarwono)
- Sholihah, Q., Khairiyati, L., & Setyaningrum, R. (2008). Pajanan Debu Batubara dan Gangguan Pernafasan Pada Pekerja Lapangan Tambang Batubara. *Jurnal Kesehatan Lingkungan*, 4(2), 1–8. <https://www.neliti.com/id/publications/3916/pajanan-debu-batubara-dan-gangguan-pernafasan-pada-pekerja-lapangan-tambang-batu>
- Subandi. (2011). Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode dalam Penelitian Pertunjukan. *Harmonia*, 11(2), 173–179. <https://doi.org/10.15294/harmonia.v11i2.2210>
- Tempo. 2022. Polusi Smelter Nikel di Kabupaten Bantaeng. Polusi Smelter Nikel di Kabupaten Bantaeng - Newsletter Tempo.co. Diakses pada 23 Februari 2023. <https://newsletter.tempo.co/read/1629624/polusi-smelter-nikel-di-kabupaten-bantaeng>
- Thomson, A. M., & Perry, J. L. (2006). Collaboration Processes: Inside the Black Box. *Public Administration Review*, 1(December). <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2006.00663.x>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40785/uu-no-38-tahun-2004>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38771/uu-no-32-tahun-2009>
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38578/uu-no-4-tahun-2009>
- United Nations. 2017. Goal 13: Take Urgent Action to Combat Climate Change and Its Impacts. <http://www.un.org/sustainabledevelopment/climatechange-2/>.
- Wibowo, V. A. S., & Mulia, T. W. (2020). Determinan dan Konsekuensi Pengungkapan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 13(2), 143–155. <http://dx.doi.org/10.30813/jab.v13i2.1977>
- Wood, D. J., & Gray, B. (1991). Theory of Collaboration. In *Journal of Applied Behavioral Science* (Vol. 27, Issue 2, pp. 139–162). <https://doi.org/10.1177/0021886391272001>

**Biografi Penulis**

**NUR KHALISA M. MUSA**, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

- Email: [nurkhalisammusa@gmail.com](mailto:nurkhalisammusa@gmail.com)
- ORCID:
- Web of Science ResearcherID:
- Scopus Author ID:
- Homepage: